

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH , DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, TERHADAP BELANJA DAERAH DAN DANA BAGI HASIL SEBAGAI PEMODERASI PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI JAWA BARAT PRIODE TAHUN 2010-2014

Joko Untung, Tri Widyastuti dan Suyanto
Program Magister Akuntansi Universitas Pancasila
Email : joko.untung@pactoconvex.com

Abstrak: Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber utama pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan menguji pengaruh Dana Bagi Hasil sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara PAD, DAU, DAK dengan Belanja Daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 Kabupaten/Kota yang ditentukan dengan metode purposive sampling. Kriteria yang digunakan dalam penentuan sampel yaitu Kabupaten/Kota yang mempublikasikan APBD secara konsisten dari tahun 2010-2014. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan DAK secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Secara parsial PAD dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian dengan metode analisis regresi moderasi (MRA) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil bukan variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan PAD, DAU, DAK dengan Belanja Daerah

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja daerah dan bagi hasil

Abstract: Regional generated revenues is the main source of regional funding, therefore the ability to implement the economic measure of the magnitude of the contribution made by the Regional generated revenues of the budget, the greater the contribution that can be provided by the Regional generated revenues of the budget means less dependence of local governments on central government and. The objective of the research was to find out the influence of PAD (Regional Generated Revenues), DAU (General Allocation Fund), and DAK (Specific Allocation Fund) and Sharing Funds as moderating variable on the relationship between PAD, DAU, DAK with regional expenditure. The sample used in this study were 26 Districts / Towns comprises were determined by purposive sampling method. The criteria used in determining the sample of the Regency / City Budgets publish consistently from 2010-2014. The data used in this research is secondary data. The results showed that the PAD, DAU and DAK simultaneously affect the regional expenditure. Partially PAD and DAU effect on regional expenditure while DAK has no effect on regional expenditure. The results of the research with moderation regression analysis (MRA) showed that DBH not moderating variables strengthen or weaken the relationship PAD, DAU, DAK with regional expenditure

Keywords: regional generated revenues ,general allocation fund, specific allocation fund, the regional expenditure and fund sharing

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah. (Mardiasmo, 2002 : 63.66)

Menurut Koswara (2000), daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggalang sumber-sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan peme-

rintahan daerahnya. Secara empiris nilai PAD, DAU, DBH, DAK dan BD Kabupaten/Kota Jawa Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah PAD, DAU, DBH, DAK dan BD Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat Tahun 2010 – 2014 (dalam Rp Juta)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014
1	PAD	3.604.829	5.868.996	7.937.800	10.201.312	11.518.750
2	DBH	4.295.910	3.869.576	4.240.895	3.450.540	3.321.064
3	DAU	17.604.174	19.473.659	24.304.467	27.124.440	29.640.394
4	DAK	1.690.949	1.654.415	1.924.537	1.986.537	2.119.636
5	BD	33.948.924	40.211.717	54.743.633	54.743.633	59.827.737

Sumber: Jawa Barat Dalam Angka 2010–2014 dan Ditjen Perimbangan Keuangan (diolah)

Tabel 1. menunjukkan bahwa dalam periode tersebut jumlah DP khususnya dari komponen DAU merupakan sumber terbesar dalam membiayai BD.

Tabel 2. Peningkatan PAD, DAU, DBH, DAK dan
BD Kabupaten / Kota Di Jawa Barat
Tahun 2010 – 2014 (dalam persentase)

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	Rata- Rata
1	PAD	-	62.85	35.25	28.52	12.91	34.88
2	a. Dana Bagi Hasil	-	-9.92	9.60	-18.64	-3.75	-5.68
	b. Dana Alokasi Umum	-	10.62	24.81	11.60	9.28	14.08
	c. Dana Alokasi Khusus	-	-2.16	16.33	3.22	6.70	6.02
3	Belanja Daerah	-	18.45	14.28	19.13	9.29	15.29

Dari paparan di atas, maka Tujuan dari penelitian ini dilakukan untuk mengetahui adanya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah dan menguji pengaruh Dana Bagi Hasil sebagai variabel moderating terhadap hubungan antara PAD, DAU, DAK dengan Belanja Daerah.

PEMBAHASAN

Definisi Anggaran adalah suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter standar ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun. (Mulyadi :2001)

Anggaran adalah suatu pendekatan yang formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen dalam perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. (Gunawan Adisaputro dan Marwan Asri 1989:6).

Penyusunan APBD merupakan hal yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan fungsi daerah. Oleh karena itu, haruslah disusun dan dipertimbangkan dengan seksama yang dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Dana Peimbangan menurut Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni :

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

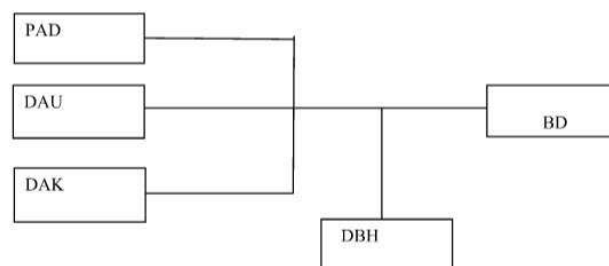
Belanja Daerah

1. Pengertian

Menurut Abdul Halim (2002:73) mengemukakan bahwa: “Belanja Daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau deplesi asset, atau terjadinya utang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada para peserta ekuitas dana”.

METODOLOGI PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan review literatur yang dikemukakan di atas, maka. Berikut rerangka penelitian dalam penelitian ini



Gambar 1. Kerangka pemikiran

Sumber: Dikembangkan Untuk Penelitian

Pengembangan Hipotesis

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: PAD berpengaruh terhadap BD

H₂: DAU berpengaruh terhadap BD

H₃: DAK berpengaruh terhadap BD

H₄: PAD berpengaruh terhadap BD dengan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi

H₅: DAU berpengaruh terhadap BD dengan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi

H₆: DAK berpengaruh terhadap BD dengan Dana Bagi Hasil sebagai Pemoderasi

Untuk pengumpulan data skunder ini melalui studi pustaka pada laporan historis yang telah disusun dalam arsip (data dokumenter), berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah selama priode 2010-2014 yang telah dipublikasikan oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan dengan cara mengunduh data / download pada <http://www.djpk.depkeu.go.id>.

Definisi Operasional

Belanja daerah (BD)

Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan jumlah dana belanja daerah kabupaten / kota di Jawa Barat dalam satuan rupiah, untuk selanjutnya sebagai variabel dependen.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, BD dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$BD = [BTL + BL] \dots\dots\dots (1)$$

Notasi : BD = belanja daerah ;

BTL = belanja tidak langsung;

BL = belanja langsung

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan jumlah penerimaan daerah kabupaten / kota dalam satuan rupiah, untuk selanjutnya sebagai variabel independen pertama.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PAD dihitung dengan menggunakan rumusan :

$$PAD = [PD + RD + HPKDP + LPADS] \dots\dots\dots (2)$$

Notasi : PAD = pendapatan asli daerah ;

PD = pajak daerah;

RD = retribusi daerah;

HPKDP = hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

LPADS = lain – lain pendapatan asli daerah yang sah

Dana Alokasi Umum (DAU)

Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan jumlah dana perimbangan dari komponen dana alokasi umum kabupaten / kota di Jawa Barat dalam satuan rupiah, untuk selanjutnya sebagai variabel independen kedua.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004, DAU dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$DAU = [AD + CF] \dots\dots\dots (3)$$

Notasi : DAU = dana alokasi umum ;

AD = alokasi dasar;

CF = celah fiskal

Dana Bagi Hasil (DBH)

Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan jumlah dana perimbangan dari komponen dana bagi hasil pajak dan bukan pajak kabupaten / kota di Jawa Barat dalam satuan rupiah,

untuk selanjutnya sebagai pemoderasi

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan PP Nomor 55 Tahun 2005, DBH dihitung dengan menggunakan rumusan :

$$DBH = [DBHP + DBHBP] \dots\dots\dots (4)$$

Notasi : DBH = dana bagi hasil ;

DBHP = dana bagi hasil pajak;

DBHBP = dana bagi hasil bukan pajak.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan data skala rasio yang diukur dengan menggunakan jumlah dana perimbangan dari komponen dana alokasi khusus kabupaten / kota di Jawa Barat dalam satuan rupiah, untuk selanjutnya sebagai variabel independen keempat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, DAK dihitung dengan menggunakan rumusan:

$$DAK = [PU \text{ APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}] \dots\dots\dots (5)$$

Notasi: DAK = dana alokasi khusus

PU APBD = penerimaan umum APBD

(PAD + DAU + DBH)

PAD = pendapatan asli daerah;

DAU = dana alokasi umum;

DBH = dana bagi hasil;

Metode Analisis Data

Data penelitian PAD, DAU, DBH, DAK dan BD kabupaten / kota di Jawa Barat, selanjutnya dilakukan proses pengolahan dengan sistem data panel (pooled data). Hasil pengolahan dengan software komputer selanjutnya dilakukan analisis untuk kepentingan statistika deskriptif dengan menggunakan deskripsi data penelitian yang meliputi (range, minimum, maximum, mean), uji ekonometrika, uji kebaikan model. Untuk menguji hipotesis pertama sampai dengan keempat digunakan analisis regresi berganda (multiple regression)..

Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dapat dijabarkan sebagai berikut:

1). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya apakah mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik harus mempunyai distribusi normal atau mendekati normal (Ghozali 2006). Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan uji statistik non parametrik Kolmogorov Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis:

2). Uji Multikolinearitas

Menurut Imam Ghozali Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Model korelasi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi maka variabel ini tidak ontogonal. Variabel

3). Uji Autokorelasi

Menurut Imam Ghozali uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

4). Uji Heterokedastitas

Menurut Imam Ghozali Uji heterokedastitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Penelitian ini menggunakan Uji Gletser untuk meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 2003)

5). Uji Kebaikan Model

Pengujian model penelitian secara statistik akan diukur dari nilai koefisien determinasi dan ANOVA. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang nilai antara nol dan satu. Model dianggap baik apabila nilai R^2 yang mendekati satu. Sementara kriteria ANOVA berdasarkan nilai $\text{sig} < 0,05$, maka model dinilai baik.

Analisis Regresi dengan Variable Moderasi

Penelitian ini menggunakan analisis regresi variable moderating (Moderating Regresi Analysis /MRA).. Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linier regresion) adalah sebagai berikut :

1) $Y = a + b_1BD + b_2DAU + b_3DAK + e \dots$ Tanpa melibatkan variable moderasi

2) $Y = a + b_1BD + b_2DAU + b_3DAK + b_4DBH + e \dots$ Melibatkan Variable moderasi

Pengujian Hipotesis

Adapun pengujian terhadap hipotesis yang diajukan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Uji F

Uji F dilakukan untuk mengetahui ada-

nya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah sebesar 5%, dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel.

b. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel independennya. Tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 5%, dengan derajat kebebasan $df = (n-k-1)$, dimana (n) adalah jumlah observasi dan (k) adalah jumlah variabel.

Analisa Data

1. Analisis Deskriptif Statistik

Gambaran atau deskriptif data dapat dilihat dari nilai rata-rata (*Mean*), maksimum, minimum, dan deviasi standar (*standard deviation*) dari setiap variabel dalam penelitian dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini.

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
PAD (X1)	130	37358,70	1762952,23	300832,2128	324433,72268
Dana Alokasi Umum (X2)	130	217383,60	2055944,99	906025,0087	381373,68713
Dana Alokasi Khusus (X3)	130	1967,40	216694,72	72451,5112	46246,04547
Dana Bagi Hasil (Z)	130	44326,00	526521,00	147290,2300	100603,52700
Belanja Daerah (Y)	130	361961,51	5255142,56	1801588,4091	922812,48608
Valid N (listwise)	130				

Tabel 3. Deskriptif Statistik

Sumber : Data diolah, 2016

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2011).

a. Uji Normalitas Residual

Uji normalitas data ini dilakukan dengan uji Kolmogorof – Smirnov berdasarkan probabilitas (Asymptotic Significance)

Hasil uji normalitas disajikan atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi Asymp Sig 2 tailed untuk nilai residual sebesar 0,404. Karena nilai di atas 0,05 maka model regresi berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas disajikan sebagai berikut: diketahui bahwa nilai VIF untuk ketiga variabel independen kurang dari 10 dan Tolerance lebih dari 0,100. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas yaitu dengan menggunakan uji Glejser, yang dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (ABSRES) yang diperoleh dari model regresi sebagai variabel dependen terhadap semua variabel independen dalam model regresi. (Gujarati, dalam Ghozali, 2011).

d. Uji Autokorelasi

Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Jika terdapat korelasi, maka terdapat pula problem autokorelasi. Masalah autokorelasi akan berakibat pada interval keyakinan hasil estimasi menjadi melebar, sehingga uji signifikansi menjadi tidak kuat.

Dapat diketahui bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,825. Sedangkan dari tabel DW dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 130, serta k = 3 (k adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dl sebesar 1,667 dan du sebesar 1,761. Karena nilai DW (1,825) berada pada daerah antara du dan $4-du$, maka H_0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah autokorelasi.

Evaluasi Uji Keباikan Model

1) Uji F (uji koefisien regresi secara bersama-sama)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil uji F yang diperoleh setelah data diolah adalah: Karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($1231,896 > 2,677$), maka H_0 ditolak, artinya bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2) Analisis koefisien determinasi (Adjusted R Square)

Nilai determinasi menunjukkan seberapa besar prosentase model regresi mampu menjelaskan variabel dependen. Batas nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$ sehingga apabila R^2 sama dengan nol (0) berarti variabel tidak bebas tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas secara serempak, sedangkan bila R^2 sama dengan 1 berarti variabel bebas dapat menjelaskan variabel tidak bebas secara serempak.

Hasil analisis determinasi (Adjusted R^2) yang diperoleh setelah data diolah diperoleh nilai Adjusted R^2 sebesar 0,966 (96,6%). Hal ini menunjukkan bahwa variasi variabel independen yang digunakan dalam model (pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) mampu menjelaskan sebesar 96,6% variasi variabel belanja daerah, dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

3) Analisis Regresi Linier dan Uji Hipotesis

a. Persamaan Regresi Linier Berganda

Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda (*multiple regression*) dengan penggunaan persamaan kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*) dalam penaksiran model. Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara variabel dependen (Y) dengan dua atau lebih variabel independen.

Analisis regresi linier persamaan 1 ini untuk menjawab hipotesis 1, 2, 3 yang diajukan pada penelitian ini. Model regresi linier berganda untuk persamaan 1 dapat diformulasikan sebagai berikut

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = 77006,074 + 1,591X_1 + 1,284X_2 + 1,143X_3$$

b. Uji t (uji koefisien regresi secara parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Berdasar uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pendapatan asli daerah, Dana alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4) Analisis MRA dan Uji Hipotesis

Analisis MRA (Moderate Regression Analysis)

Hasil yang diperoleh setelah data diolah dengan bantuan program SPSS disajikan berikut ini: Berdasarkan hasil uji t disimpulkan sbb:

- a) Dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
- b) Dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja daerah.
- c) Dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Kajian Teori

Teori Keagenan

Grand theory dalam Penelitian ini menggunakan Teori agensi yang dijelaskan oleh Jansen dan Meckling" *An agency relationship is one in which "one or more persons (the principal[s]) engage another person (the agent) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision making authority to the agent"* penjelasan ini memberikan gambaran hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak dimana satu atau lebih (principal) menyewa orang lain (agent) untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan mereka dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.

Kajian Penelitian Terdadulu

Abdullah dan Halim (2003), melakukan uji penelitian flypaper effect pada belanja daerah kabupaten / kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Hasil penelitian menyatakan bahwa flypaper effect terjadi pada DAU terhadap BD.

Prakosa (2004), melakukan penelitian flypaper effect pada 40 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY tahun 2000/2001 s/d 2001/2002. Hasil penelitian menyatakan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah (BJD),

Maimunah (2006), melakukan penelitian yang sama pada kabupaten / kota di pulau Sumatra tahun 2003 dan 2004. Hasil penelitian yang diperoleh konsisten dengan penelitian Abdulah dan Halim, yaitu DAU memiliki pengaruh yang lebih besar daripada PADt-1t-1 terhadap BD. Namun ketika diuji pengaruh DAU dan PADt-1 secara bersama – sama hasilnya PAD tidak signifikan terhadap BD.

Widodo (2007), melakukan penelitian pada 9 kabupaten / kota di Bali tahun 2000 – 2004. Hasil penelitian menyatakan bahwa baik DAU maupun PAD berpengaruh signifikan positif terhadap BD, adapun untuk DAU hanya mengalami flypaper effect pada tahun 2003.

Kajian peneliti terdahulu menunjukkan bahwa populasi, sampel, lokasi dan tahun penelitian memang berbeda

HASIL PENELITIAN

1. Hipotesis H1

Hipotesis H1 adalah Pendapatan Asli daerah berpengaruh terhadap Belanja daerah, berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Pendapatan asli daerah

secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

2. Hipotesis H2

Hipotesis H2 adalah Dana alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Alokasi dana umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

3. Hipotesis H3

Hipotesis H3 adalah Dana alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Alokasi dana khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

4. Hipotesis H4

Hipotesis H4 adalah Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan pemoderasi Dana bagi Hasil berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Pendapatan asli daerah secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan variabel dana bagi hasil sebagai pemoderasi.

Sedangkan dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.

5. Hipotesis H5

Hipotesis H5 Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan pemoderasi Dana bagi Hasil berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Alokasi dana umum secara parsial berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan variabel dana bagi hasil sebagai pemoderasi.

Sedangkan Dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh DAU terhadap belanja daerah.

6. Hipotesis H6

Hipotesis H6 DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah dengan pemoderasi Dana bagi Hasil berdasarkan uji t yang dilakukan didapat Alokasi dana khusus secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dengan variabel dana bagi hasil sebagai pemoderasi.

Sedangkan Dana bagi hasil sebagai variabel moderasi tidak memperkuat pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja daerah.

Hasil penelitian juga memperkuat basis teori penyusunan anggaran bersifat *incrementalism*, bahwa

alokasi anggaran belanja daerah akan menyesuaikan dengan bertambah / berkurangnya jumlah anggaran pendapatan daerah. Secara empiris penelitian ini telah membuktikan besarnya belanja daerah pada kabupaten / kota di Jawa Barat masih lebih besar dipengaruhi oleh dana perimbangan khususnya DAU yang diterima dari Pemerintah Pusat. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap, Dana Alokasi Umum .
2. Dana alokasi khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Saran

1. Penerimaan daerah yang akan datang disamping PAD, DAU, DBH dan DAK, agar memasukkan komponen lain – lain penerimaan daerah yang sah untuk meningkatkan alokasi belanja daerah maka Pemerintah Daerah diharapkan bisa terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara intensifikasi
2. Bagi akademisi peneliti diharapkan untuk pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sukriy & Halim, Abdul, Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten / Kota Di Jawa dan Bali, *Jurnal Ekonomi STEI Nomor 2 / Tahun XIII / 25*, 2004.
- Abdul Halim, Akutansi Sektor Publik - Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba empat, Jakarta , 2001
- Abdul Halim, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 2004
- Abdul Halim dan Mujib, Ibnu, *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah*, Sekolah Pasca Sarjana UGM, Edisi Pertama, Yogyakarta, 2009
- Gunwawan. Adisaputro dan Marwan Asri, *Anggaran Perusahaan BPFE*, Yogyakarta, 1989

- Ghozali, Imam, , *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2006
- Koswara E., *Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan kemandirian Rakyat* , Yayasan Pariba, Jakarta , 2001
- Kusumadewi, Dyah Ayu dan Rahman, Arief, , *Flypapaer Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Pada Kabupaten / Kota Di Indonesia*, *JAAI Volume 11 Nomor 1*, Yogyakarta, 2007.
- Manullang, M, , *Dasar – Dasar Manajemen*, Cetakan XVIII, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005
- Mardiasmo, 2002, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi IV, CV Andi Offset, Yogyakarta, 2002
- Mulyadi, Akuntansi manajemen, STIE YKPN, Yogyakarta, 2001
- Maimunah, Mutiara, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Pulau Sumatra*, *Symposium Nasional Akuntansi IX*, Padang. 2006.
- Pratiwi, Maulida Novi, *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten / Kota di Indonesia*, *Skripsi (tidak dipublikasikan)*, UII, Yogyakarta. 2007.
- Prakosa, Kesit Bambang, 2004, *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY*, *JAAI Volume 8 Nomor 2*, UII, Yogyakarta, 2004.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*,.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*,
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2009, *Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Rosdini, dini, . *Akuntansi Pendapatan dan Belanja Bagi Pemerintah Daerah*, Makalah dipresentasikan pada Biro Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ,Juli 2008
- Ruth Nikijuluwa,, *Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat terhadap Upaya Pemungutan Pajak Kabupaten/Kota di Indonesia*, jurnal Fakultas Ekonomi , Pusat data dan bisnis Indonesia, 2012
- Widodo, Pambudi Tri, *Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota di Bali*, *Skripsi (tidak dipublikasikan)*, UII, Yogyakarta. 2007